

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief, BN 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Badriyah, SM 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajrimei, A.G 2005, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta.
- Friedman 1960, *Legal Theory*, Stren & Stou Limited, London.
- Salim, HS 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siswanto, A 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Indroharto 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Indroharto 1994, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim, J 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya.
- Rokan, MK 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy. J.M 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Marzuki, PM 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pratiwi, et al. 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, the Center for International Legal Cooperation in Partnership with Indonesian Institute for Independent Judiciary, Jakarta.

Agus Riyanto, 2021

“PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL” (Studi: Penugasan PT. Hutama Karya (Persero) Dalam Pengusahaan Jalan Tol Di Sumatera)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Ridwan. HR 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, S 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

2. Artikel Jurnal

Hikmanto, J 1999, 'Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 Tahun 1999', *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1 No 1, UII Yogyakarta.

Smith, Julian, et.al 2015, 'Membangun Masa Depan Indonesia Membuka Aliran Proyek', *Jurnal Prakarsa*, Edisi 22.

Pasaribu, B 2010, 'Regulasi Dan Persaingan Sehat Dalam Sistem Ekonomi Indonesia', *Jurnal Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 4.

Tri, Anggraini M.A 2010, 'Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha', *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2 No. 4.

3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ayudha. D. Prayoga et al. (ed.) 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS. Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan, Jakarta.

Joesoef, I.E, 2011, *Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta: Studi Penerapan Kontrak Build Operate Transfer Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia*, Desertasi, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Koica 2010, *Final Report: The Establishment of A Master Plan For The Arterial Road Network In Sumatera Island*, Kementerian PUPR, Jakarta.

Soeriaatmadja, Arifin 2010, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham – RI, Jakarta.

4. Makalah/Pidato

Erika, SP & Wisudanto 2016, 'Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi' : Paparan Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia di Graha ITS, 03 Agustus 2016, Surabaya.

Simanjuntak, K 2020, 'Pembahasan Rencana Pembangunan Tahun 2020' : Paparan Rapat Banggar DPR RI, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, 24 Juni 2020, Jakarta.

Waskita Karya 2019, 'Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (TBPPKA)' : Paparan Rapat Persiapan Audit, di Kantor BPKP, Oktober 2019, Jakarta.

5. Internet

Adhi Karya 2020, 'Pemegang Saham', diakses tanggal 22 Mei 2020, <https://adhi.co.id/hubungan-investor-gp0xz25971XBanJDoXq1#saham>

Badan Pengatur Jalan Tol 2020, 'Sejarah', diakses tanggal 18 Mei 2020 <http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah>

Brantas Abipraya 2020, 'Pemegang Saham', diakses tanggal 22 Mei 2020 <http://www.brantas-abipraya.co.id/id/informasi-pemegang-saham/index>

CNN Indonesia 2020, 'Saham Istaka Karya', diakses tanggal 22 Mei 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181003102900-92-335260/jokowi-restrukturisasi-saham-istaka-karya>

Hutama Karya 2020, 'Pemegang Saham', diakses tanggal 22 Mei 2020, <https://www.hutamakarya.com/pemegang-saham>

Jasa Marga 2020, 'Profil Perusahaan', diakses tanggal 18 Mei 2020, <https://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/ProfilPerusahaan/Overview.aspx>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2020, 'Wewenang', diakses tanggal 14 Mei 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>

Medanbisnisdaily.com 2020, 'Tol Trans Sumatera Layak Secara Ekonomi', Senin, 05 Maret 2015, diakses tanggal 10 April 2020, <https://www.Medanbisnisdaily.com/news/read/?id=149761>

Miriam, Webster, 'Dictionary', <https://www.merriam-webster.com>

Nanda, Efendi 2015, 'Syarat-Syarat UU/Peraturan Perundang-undangan yang baik', diakses tanggal 14 Mei 2020. <https://catatananiefendi.blogspot.com/2015/09/syarat-syarat-uuperaturan-perundang.html>

Nindya Karya 2020, 'Pemegang Saham', diakses tanggal 22 Mei 2020, <https://www.nindyakarya.co.id/profile>

Pembangunan Perumahan 2020, 'Pemegang Saham', Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020, <https://www.ptpp.co.id/investor-relation/shareholder>

Radjagukguk, E 2012, 'Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara', tanggal 31 Oktober 2012, diakses tanggal 14 Mei 2020 <https://www.hukumonline.com>

Riza, M 2017, 'Kepastian Hukum', 15 November 2017, diakses tanggal 13 Mei 2020, <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>

- Upperline 2020, 'Profile', diakses tanggal 22 Mei 2020, https://upperline.id/profile/profile_detail/amarta-karya
- Upperline 2020, 'Pemegang Saham', diakses tanggal 22 Mei 2020, https://upperline.id/profile/profile_detail/perumnas
- Waskita Karya 2020, 'Pemegang Saham', diakses tanggal 22 Mei 2020, <https://www.waskita.co.id/pages/investor-relations/shareholder?lang=id>.
- Wijaya Karya 2020, 'Pemegang Saham', diakses tanggal 22 Mei 2020, <http://investor-id.wika.co.id/shareholdings.html>
- Widowati, H 2019, 'Bangun Tol 2.700 km, Utama Karya Butuh PMN Rp 10-15 Triliun per Tahun', diakses tanggal 20 Mei 2020. <https://katadata.co.id/berita/2019/03/06/bangun-tol-2700-km-utama-karya-butuh-pmn-rp-10-15-triliun-per-tahun>

6. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta
- Indonesia, Undang-Undang 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Jakarta
- Indonesia, Undang-Undang 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jalan Nomor 38 Tahun 2004*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah 2005, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jalan Tol Nomor 15 Tahun 2005*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah 2013, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Nomor 43 Tahun 2013*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah 2017, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Nomor 30 Tahun 2017*, Jakarta.

- Indonesia, Peraturan Pemerintah 2005, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor 23 Tahun 2005*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah 2012, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor 74 Tahun 2012*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Presiden 2005, *Peraturan Preside Republik Indonesia tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Nomor 67 Tahun 2005*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Presiden 2013, *Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Nomor 66 Tahun 2013*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Presiden 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera Nomor 100 Tahun 2014*, Jakarta
- Indonesia, Peraturan Presiden 2015, *Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera Nomor 117 Tahun 2015*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Presiden 2015, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Nomor 38 Tahun 2015*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Menteri 2017, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol Nomor 01/Prt/M/2017*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Kepala 2015, *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015*, Jakarta.
- Indonesia, Pernyataan Standar, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tentang Aset*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta

7. Putusan Pengadilan

- Mahkamah Agung RI 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian terhadap Pasal 2 huruf g dan huruf I UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Mahkamah Agung RI, Jakarta).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI 2017, Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/Kppu-Pat/X/2017 Tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Trans Jabar Tol, PT

Sriwijaya Markmore Persada Dan PT Pemalang Batang Tol Road Oleh PT Waskita Toll Road, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Jakarta)